

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki isu pembangunan manusia yang menarik untuk diteliti. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial ekonomi masyarakat menuju kearah yang lebih baik dan berkesinambungan. Dalam menetapkan Indeks Pembangunan Manusia mencakup tiga bidang yaitu kualitas tingkat pendidikan , kesehatan dan ekonomi (Amarodin, 2014).

Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas

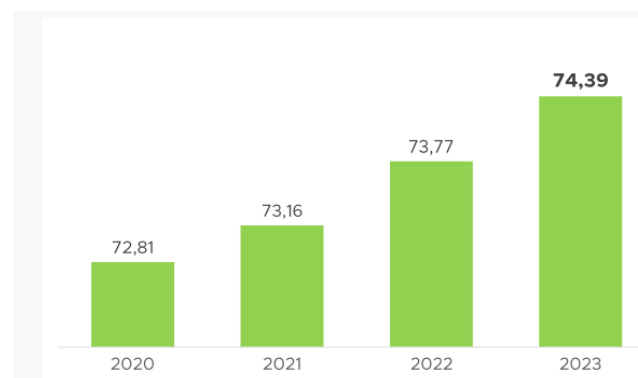
dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan (Anggraini, 2023).

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek hidup dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak” (Sumber : BPS)

Keberhasilan pembangunan manusia dapat diketahui dari beberapa faktor yang mendukung IPM. Ada 3 indikator yang mendukung IPM yaitu kesehatan yang diperoleh masyarakat dengan baik, pendidikan yang dicapai, dan tingkat ekonomi yang baik. Ketiga indikator inilah yang menjadi tujuan utama keberhasilan pada tingkat pembangunan manusia. Jika dilihat dari indikator tingkat pendidikan, apabila tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat rendah maka akan membuat masyarakat kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Banyaknya penyebab seseorang sulit dalam mencari pekerjaan dapat. Anggota masyarakat mungkin akan memilih jalan lain untuk mendapatkan uang seperti menjadi seorang pengemis, mencuri, bahkan mereka sendiri mampu menjual diri (Faelassuffa & Yuliani, 2022).

Bisa diketahui bahwa jika tingkat pendidikan rendah maka pengangguran akan meningkat dan menyebabkan masyarakat miskin meningkat. Jika kemiskinan terus meningkat maka indeks pembangunan manusia akan menurun. Jika

masyarakat terus menerus mengacuhkan pendidikan maka harapan untuk mendapat pekerjaan akan sulit sehingga pengangguran akan semakin tinggi dan hal itu bukan hanya menyebabkan tingkat kemiskinan semakin tinggi tetapi juga IPM menjadi rendah. Hal demikian bukan hanya terjadi secara rasional tetapi juga dalam regional (provinsi) (Azfirmawarman et al., 2023).

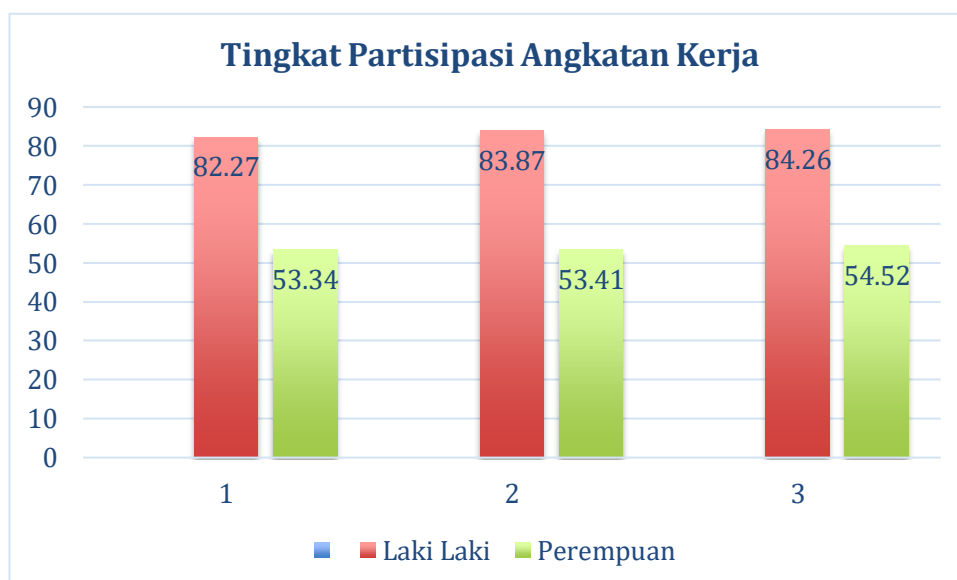


Gambar I.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2020–2023
(Sumber , <https://www.bps.go.id/> (Data diolah)

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sejak 2020, status pembangunan manusia Indonesia sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2023, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,72 persen per tahun, dari 72,81 pada 2020 menjadi 74,39 pada 2023, Peningkatan IPM 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,38 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 0,15 persen dan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 3,66 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 2,90 persen. Sementara itu, Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya sedikit melambat, dari 0,33 persen menjadi 0,31 persen. Rata-

rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya juga melambat, dari 1,76 persen menjadi 0,92 persen

Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur IPM adalah Angkatan kerja, Tenaga kerja pada hakikatnya terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. persentase angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga turut berkontribusi dalam besar kecilnya tingkat produktivitas masyarakat suatu wilayah. Pada dasarnya, tujuan seseorang bekerja adalah untuk memperoleh penghasilan sehingga bisa dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. Sampai saat ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sebab ketenagakerjaan dapat menjadi sumber masalah kemiskinan. Jika suatu wilayah memiliki jumlah penduduk yang berstatus tidak bekerja lebih banyak, maka akan berimplikasi pada peningkatan jumlah penduduk miskin dan sebaliknya (Anggraini, 2023).



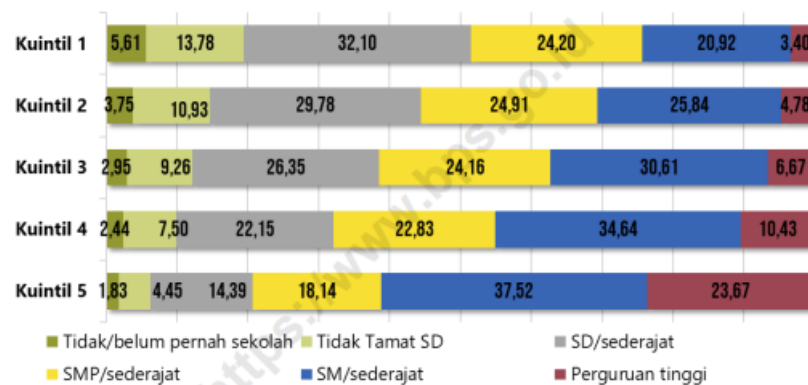
Gambar I.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2021-2023
(Sumber , <https://www.bps.go.id/> (Data diolah)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran tahun 2021-2023 TPAK Indonesia selalu mengalami kenaikan , hal ini tentu bisa berdampak baik untuk IPM di Indonesia , jika TPAK meningkat maka akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih besar Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yakni sebuah ukuran dimana kerap digunakan melihat fluktuasi dari partisipasi penduduk usia kerja. TPAK yang semakin besar, maka angkatan kerja dalam kelompok yang sama juga semakin besar. Kebalikannya, bertambah besarnya jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, maka jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja semakin besar, dan jumlah angkatan kerja semakin kecil, serta TPAK juga akan semakin kecil

Salah satu indikator yang mempengaruhi IPM adalah pendidikan . pendidikan merupakan variabel yang sangat berpengaruh terhadap IPM dan tingkat IPM di suatu daerah tergantung pada pendidikan nya. pendidikan adalah suatu usaha untuk menarik sesuatu ke dalam diri manusia dan memberikan berbagai pengalaman belajar yang terprogram dalam bentuk pendidikan formal, informal dan nonformal baik di dalam maupun di luar sekolah, bagi setiap individu sepanjang hidupnya dan bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki setiap individu sehingga dapat berperan dalam kehidupan masa depannya (Bastianingrum, 2023)

Pendidikan dan IPM mempunyai hubungan yang sangat erat, untuk meningkatkan pembangunan manusia di suatu daerah/negara yang sangat dibutuhkan adalah pendidikan . pendidikan merupakan suatu bentuk investasi

yang dapat meningkatkan mutu dan kemampuan sumber daya manusia, dengan adanya ilmu pengetahuan yang baik dan berwawasan luas maka pembangunan manusia di negara tersebut juga ikut berkualitas, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat produktivitasnya sehingga akan berpotensi untuk meningkatkan output di negara tersebut. pendidikan sangat berkontribusi dalam peningkatan IPM di Indonesia (Bastianingrum, 2023).



Gambar I.3 Tingkat pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Ekonomi, 2023

Tujuan pembangunan pendidikan, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, merata, dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Oleh karena itu, pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, maupun waktu. Salah satunya pemerintah juga harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan ekonomi.

Indikator selanjutnya yang berpengaruh terhadap IPM yaitu Pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang belum mendapatkan

pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran adalah angkatan kerja yang mencari pekerjaan dengan kemampuan yang dimiliki, namun karena terbatasnya lapangan kerja sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Pengangguran dapat berpengaruh terhadap IPM dimana Tingkat Pengangguran yang tinggi menyebabkan masyarakat “tidak dapat memaksimalkan kesejahteraannya. Faktor utama yang dapat menimbulkan terjadinya pengangguran yaitu kekurangan pengeluaran agregat. Pada umumnya pengeluaran agregat yang terwujud dalam suatu perekonomian adalah lebih rendah dari pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (Yuliadi, 2016). Kekurangan permintaan agregat merupakan faktor penting yang dapat menimbulkan terjadinya pengangguran. Selain itu ada beberapa faktor lain yang dapat memicu timbulnya Pengangguran yaitu menganggur karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, perusahaan yang lebih memilih untuk menggunakan peralatan produksi modern dibanding tenaga manusia sehingga akan mengurangi penggunaan tenaga kerja dan ketidaksesuaian antara keterampilan pencari” kerja dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri (Hidayati, 2021)



Gambar I.4 Tingkat Pengangguran Di Indonesia 2021-2023
(Sumber , <https://www.bps.go.id/> (Data diolah)

Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya Pengangguran produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah-masalah sosial Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut maka dapat dilakukan cara dengan meningkatkan pembangunan manusia seperti memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki agar SDM yang ada di negara tersebut bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Selain itu kesehatan juga dibutuhkan untuk bekerja. Jika SDM yang ada berkualitas dan sehat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi Tingkat Pengangguran (Wijaya et al., 2020) .

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diajukan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Angkatan Kerja, pendidikan dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia”

1.2 Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diajukan sebelumnya maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. IPM Indonesia memang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun hal tersebut belum di dukung oleh faktor seperti , Angkatan kerja, pendidikan dan Tingkat Pengangguran
2. Masih banyak angkatakan kerja yang tidak terserap sepenuhnya sehingga IPM Indonesia tidak maksimal
3. Di beberapa lokasi pendidikan masih tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah daerah lain
4. Tingkat Pengangguran Indonesia masih terbilang tinggi.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Karena besarnya cakupan permasalahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dan luasnya total subjek penelitian, maka dalam penelitian ini penulis hanya membatasi faktor Angkatan Kerja, pendidikan dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia.

1.3.2 Rumusan Masalah

Dari hasil latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah

1. Apakah angkatan kerja, berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia

2. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia
3. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia
4. Apakah Faktor faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah angkatan kerja, berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia
2. Untuk mengetahui apakah pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia
3. Untuk mengetahui apakah pengangguran berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia
4. Untuk mengetahui apakah Faktor faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Secara Teori hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa tentang pendidikan , Pengangguran Terbuka dan Pembangunan Manusia di Indonesia, sebagai referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Secara Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam konteks pembangunan manusia di Indonesia dan dapat menambah wawasan pembaca tentang pentingnya Indeks Pembangunan Manusia dalam mencapai peningkatan pendidikan dan menurunkan angka Pengangguran dengan keberadaan SDM Indonesia yang terus meningkat.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.1.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990, “United Nations Development Programme (UNDP) mengembangkan IPM yang bertujuan untuk menekankan pentingnya manusia dan sumber daya yang dimiliki dalam pembangunan. IPM dibentuk dari tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan rata-rata umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah bagi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dan rata-rata harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Dimensi standar hidup layak diukur” dengan rata-rata pengeluaran riil per kapita penduduk yang disesuaikan (BPS, 2020).

Menurut Nations Development “Programme (UNDP) ada tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata rata suatu negara dalam pembangunan manusia yaitu:

1. Lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir,
2. pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan

3. Angka melek huruf penduduk yang berusia 15 tahun keatas, standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang sudah disesuaikan menjadi prioritas daya beli” (Suriadi, 2019).

Tingkat pembangunan manusia sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan negara dikatakan penting karena apabila ada salah satu daerah yang tidak mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang potensial maka dapat digantikan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada agar pembangunan dan kemajuan daerah tetap berjalan. IPM dapat digunakan untuk membandingkan kinerja pembanguan manusia baik antar negara maupun daerah (Sanniana Sidabutar et al., 2020). Indeks Pembangunan Manusia adalah variabel yang mencerminkan “tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk terhadap layanan dasar dibidang pendidikan , kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. IPM dapat menjadi tolak ukur untuk mengukur dan menilai keberhasilan suatu negara, semakin tinggi tingkat IPM maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan dicapai (Anggraini, 2023).

Dengan meningkatnya kualitas IPM di bidang pendidikan , akan menciptakan generasi-generasi yang lebih maju dan berkualitas. Pada konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis dan dipahami dari sudut manusianya bukan hanya dari sudut pertumbuhan ekonominya. UNDP menyatakan beberapa premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya (Mauludin & Dewi, 2020):

1. Pembangunan bertujuan untuk memperbesar pilihan-pilihan penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka oleh sebab itu

konsep dari pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara menyeluruh dan tidak hanya pada aspek ekonomi saja.

2. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
3. Pembangunan manusia “tidak hanya memperhatikan pada upaya peningkatan kemampuan manusia saja tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia” secara optimal
4. Pembangunan manusia merupakan dasar dalam menentukan tujuan sebuah pembangunan dan menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.
5. Pembangunan manusia didorong oleh empat pilar pokok yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan

Ada empat pilar penting yang sangat perlu untuk diperhatikan dalam mendukung upaya pembangunan manusia menurut United Nations Development Programme (UNDP) (Arfiyansyah, 2018) adalah:

1. Keadilan, masyarakat “harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan semua akses terhadap sumber daya ekonomi ” dan sosial.
2. Produktivitas, masyarakat harus mampu meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses memperoleh penghasilan atau pekerjaan yang menghasilkan imbalan
3. Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, oleh karena itu diperlukannya partisipasi penuh dari masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi masyarakat itu sendiri.

4. Kestinambungan, akses yang diperoleh tidak hanya oleh generasi sekarang, akan tetapi dapat juga diperoleh oleh generasi mendatang.

2.1.1.2 Kegunaan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik (2020) IPM mempunyai manfaat yang sangat penting diantaranya yaitu:

- a) Indeks Pembangunan Manusia dijadikan sebagai indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- b) Indeks Pembangunan Manusia dapat dijadikan sebagai penentu untuk mengetahui peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau daerah.
- c) Bagi negara Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia yaitu data yang strategis karena selain untuk mengukur kinerja pemerintah, IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM dapat diambil manfaat untuk beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Mengalihkan perhatian para pengambil keputusan, media dan organisasi non pemerintah dari penggunaan statistik ekonomi, agar lebih menekankan pada pencapaian manusia. IPM diciptakan untuk menekankan bahwa manusia dan segenap kemampuannya, seharusnya dapat menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan suatu negara atau daerah, bukan hanya pertumbuhan ekonomi.

2. Memperhatikan perbedaan antar negara-negara, diantara Provinsi-Provinsi (negara bagian), gender, suku dan kelompok sosial lainnya. Dengan melihat kesenjangan (disparitas) antara kelompok-kelompok tersebut, maka akan melahirkan berbagai debat dan dialog dari berbagai negara untuk mencari sumber masalah dan solusi apa yang harus dilakukan (Sanniana Sidabutar et al., 2020).

2.1.1.3 Ukuran Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPM = (\text{Index X1} + \text{Index X2} + \text{Index X3}) / 3$$

Keterangan:

X1 : Lama hidup

X2 : Tingkat pendidikan

X3 : Tingkat kehidupan yang layak Indeks Pembangunan Manusia mempunyai indikator penting sebagai penyusun, penyusun IPM diantaranya yaitu: kesehatan, pendidikan dan pengeluaran (Sopiah & Siregar, 2023)

2.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

2.1.2.1 Pengertian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan persentase dari penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha terlibat, dalam kegiatan produksi yaitu produksi barang dan jasa. Angkatan kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam perekonomian dalam waktu tertentu. Angkatan kerja terdiri

atas golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja yaitu mereka yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain atau menerima pendapatan (Kusumaningrum, 2021).

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan rasio atau perbandingan antara penduduk yang termasuk angkatan kerja (bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan) dengan total penduduk usia kerja. Penduduk dalam usia kerja merupakan penduduk yang telah berusia 15-64 tahun keatas yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sendiri merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari yang merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Dan semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil TPAK (Marifa, 2021). Besarnya angkatan kerja tergantung tergantung pada tingkat partisipasi angkatan kerja (labour force participation rate) yaitu berapa persen dari tenaga kerja yang akan menjadi angkatan kerja dan pengertian angkatan kerja itu sendiri merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya yang terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa. Dalam konsep labour face participation rate angkatan kerja mempunyai referensi waktu yang pasti maksudnya adalah satu minggu dan sebagainya. Menurut konsep ini berfokus kepada mereka yang bekerja (nuraisyah aisyah, 2022).

Jadi ketika mereka yang bukan pekerja (pengangguran atau mencari pekerjaan) dianggap sebagai kelompok residual.



Gambar II.1 Skema Ketenagakerjaan

Sumber: <https://ilmu-ekonomi-id.com/>
(diakses pada 27/12/2024 pukul 8.45 Wib)

Dalam ilmu kependudukan (demografi) orang yang mencari kerja termasuk kedalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Dari kategori usia angkatan kerja adalah 15-65 tahun. Namun tidak semua orang yang berusia 15-65 tahun dihitung sebagai angkatan kerja, yang dihitung sebagai angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15-65 tahun yang bekerja dan sedang mencari kerja, sedangkan yang tidak mencari kerja, masuk kedalam rumah tangga dan sekolah (Anwar & Andria, 2016).

Dari skema kependudukan diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dalam satu negara dapat dibedakan menjadi usia kerja (15-65 tahun) dan bukan usia kerja. Dari jumlah penduduk usia kerja, yang termasuk kedalam angkatan

kerja adalah mereka yang mencari kerja atau bekerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan suatu indikator yang digunakan dalam melihat perkembangan tingkat tenaga kerja di Indonesia. Tujuan untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yaitu untuk memperoleh gambaran tentang persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Dilihat dari sisi kerja, TPAK yang rendah ditemui pada kelompok penduduk usia kerja wanita dan pada penduduk usia muda.

Sedangkan dari sisi tingkat kemudahan atau kesulitan untuk mendapatkan kerja, nilai TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja dan sebaliknya TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja masih terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada tahun 2005, di Indonesia terdapat 42,3 juta penduduk usia muda yang merupakan bagian dari penduduk usia kerja dan 52,8 persen merupakan angkatan kerja (Hidayati, 2021). Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja.

Kenaikan TPAK disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi nasional yang belum stabil, sehingga memberikan pengaruh terhadap faktor-faktor produksi di Indonesia. Secara langsung naik turunnya faktor produksi akan memberikan dampak terhadap tinggi rendahnya faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja. Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan

menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, Allah juga akan memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan amal atau kerja.

2.1.2.2 . Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{jumlah angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk usia kerja}} \times 100\%$$

Angka TPAK tidak hanya dapat disajikan untuk menghitung TPAK dari seluruh penduduk usia kerja, namun dapat juga digunakan untuk menghitung TPAK penduduk usia kerja dengan spesifikasi yang lebih khusus seperti umur, jenis kelamin, atau tempat tinggal (desa,kota) (Triwahyuni, 2021).

2.1.2.3 Teori Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Menurut teori Solow, Pertumbuhan tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan modal akumulasi) dan tingkat kemajuan teknologi. Untuk lebih dalam teori ini mengembangkan teori output yang dapat berubah-ubah. Dimana untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, dapat menggunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda (Triwahyuni, 2021).

Kombinasi antara jumlah modal dan tenaga kerja yang digunakan akan menghasilkan tingkat output yang berbeda dan tingkat efisiensi yang berbeda pula. Dengan kata lain, pada suatu kombinasi tertentu antara jumlah modal dan tenaga kerja yang digunakan akan menghasilkan output yang optimal dan lebih

efisiensi dibandingkan kombinasi lainnya sehingga dengan input yang kecil mampu menghasilkan output yang optimal, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kearah yang positif. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa TPAK merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besaran output suatu kegiatan perekonomian, sehingga semakin banyak masyarakat yang produktif, maka akan menghasilkan output yang mempengaruhi PDRB.

2.1.3 Pendidikan

2.1.3.1 Definisi Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha untuk menarik sesuatu di dalam diri manusia sebagai suatu upaya untuk memberikan berbagai kesempatan atau pengalaman belajar yang berbeda-beda baik dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal di sekolah maupun di luar sekolah, yang berlangsung selamanya dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat (Prayojana et al., 2020).

Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi yang dapat meningkatkan mutu dan kemampuan sumber daya manusia, dengan adanya ilmu pengetahuan yang baik dan berwawasan luas maka pembangunan manusia di negara tersebut juga ikut berkualitas, semakin “tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat produktivitasnya sehingga akan berpotensi untuk meningkatkan output di negara tersebut. pendidikan dapat dilihat dari dua perspektif, pertama sebagai proses yaitu sebagai suatu aktivitas interaksi manusia dengan lingkungannya. Sementara itu, pendidikan sebagai hasil yaitu perubahan

yang didalamnya merupakan hasil interaksi antara manusia dengan lingkungannya, yang berupa perubahan” perilaku (Faelassuffa & Yuliani, 2022). Pengertian pendidikan menurut UUD RI No. 20 Tahun 2001. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan “terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran, sehingga siswa dapat secara aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual ” keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, pengetahuan serta berakhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat bangsa dan negara. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh penambahan keterampilan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta pemahaman agar dapat digunakan dimasa mendatang (Anggraini, 2023).

2.1.3.2 Tujuan dan Fungsi pendidikan

Menurut Ivan Illich pendidikan yang menyeluruh harus memiliki tiga tujuan yaitu sebagai berikut (Sopiah & Siregar, 2023):

1. Memungkinkan setiap individu yang ingin memberikan wawasan yang mereka miliki kepada orang lain secara efektif, begitupun bagi mereka yang membutuhkannya.
2. Memberikan kesempatan kepada semua orang agar bebas dan dapat dengan mudah mendapatkan akses belajar kapanpun yang mereka butuhkan.
3. Menjamin aksesibilitas berbagai sumber informasi umum yang terkait dengan pendidikan . Ivan Illich “lebih menekankan pada adanya peluang

setiap orang untuk dapat memiliki pilihan untuk memperoleh akses pada sumber-sumber belajar yang akan memungkinkan mereka untuk lebih mudah dalam mengembangkan potensi diri ” untuk mencapai tujuan hidup mereka.

Tujuan pendidikan “menurut eksistensialisme merupakan untuk mendorong setiap orang agar memiliki pilihan untuk mengembangkan semua potensi yang ada untuk kepuasan diri. Setiap orang memiliki kebutuhan dan perhatian yang spesifik terkait dengan pemenuhan dirinya, sehingga tidak ada rencana pendidikan yang tegas ” untuk memutuskan program pendidikan yang pasti dan berlaku secara umum (Bastianingrum, 2023).

Secara umum tujuan pendidikan itu sendiri merupakan sesuatu tujuan untuk menumbuhkan potensi bawaan seseorang dengan tujuan agar dapat berkembang dengan optimal dan mampu untuk melakukan tugas dan kewajiban sebagai khalifah di muka bumi dengan sempurna, serta sebagai subjek suatu pembangunan agar tercipta kebahagiaan dalam hidup sekarang dan nanti (Kusuma, 2018).

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, minat dan membentuk kepribadian yang baik agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat dan berwawasan luas, serta untuk mempersiapkan individu dan masyarakat agar dapat menghadapi dunia kerja. Fungsi pendidikan menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 yang berisi, pendidikan nasional berfungsi untuk dapat mengembangkan kemampuan dan untuk membentuk karakter serta peradaban suatu bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi pendidikan secara umum adalah sebagai instrumen utama yang dibutuhkan untuk membantu dalam proses keberhasilan potensi, bakat serta minat siswa agar tercapai tujuan pendidikan yang di harapkan

2.1.3.3 Indikator pendidikan

- 1) Menurut Badan Pusat Statistik pendidikan memiliki tiga indikator yang digunakan sebagai tolak ukur yaitu (BPS, 2022):
 1. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk usia sekolah tertentu yang masih bersekolah sesuai pada jenjang pendidikan yang seharusnya. APM digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk yang bersekolah tepat waktu atau yang bersekolah sesuai usia, dengan ketentuan kelompok usia sekolah tersebut di jenjang pendidikan yang sedang di tempuh. Nilai APM akan menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat menggunakan sarana pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikan nya. Jika semua anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100%.
 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk usia sekolah tertentu yang masih bersekolah tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Nilai dari APS berkisaran antara 0 s/d 100, jika nilai APS di suatu daerah tinggi artinya semakin banyak anak usia sekolah yang sedang sekolah di daerah tersebut. APS digunakan untuk dapat mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan .

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah Rasio jumlah orang yang saat ini terdaftar di sekolah pada tingkat pendidikan tertentu, tanpa memandang usia, dengan jumlah orang yang telah memenuhi persyaratan resmi sebagai penduduk pada tingkat pendidikan yang sama. Kegunaan APK adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada tingkat pendidikan .
- 2) Menunjukkan seberapa besar kapasitas yang dapat ditampung oleh sistem pendidikan untuk siswa pada usia sekolah tertentu.
- 3) Sebagai indikator tambahan dari indikator APM. Nilai APK dapat melebihi 100% karena jumlah siswa yang mengikuti jenjang pendidikan tertentu termasuk anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

2.1.3.4 Jenjang pendidikan

Jenjang pendidikan merupakan tahap pendidikan yang akan dilalui dan ditentukan berdasarkan tingkat kemajuan siswa, tujuan yang ingin dicapai serta kemampuan yang dikembangkan, tingkat pendidikan formal terbagi menjadi (Faelassuffa & Yuliani, 2022):

- a. pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang mendasari jenjang pendidikan menengah dan berlangsung selama 6 tahun. pendidikan dasar berupa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidayah (MI) atau bentuk sekolah lainnya yang sederajat.

- b. pendidikan menengah atau sekolah menengah pertama adalah lanjutan dari jenjang pendidikan dasar yang berlangsung selama 3 tahun. pendidikan menengah berupa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk sekolah lainnya yang sederajat.
- c. pendidikan menengah atau sekolah menengah atas berlangsung selama 3 tahun yang terdiri dari pendidikan menengah umum berupa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA), pendidikan menengah kejuruan berupa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lainnya yang sederajat.
- d. pendidikan tinggi adalah “jenjang pendidikan yang akan ditempuh setelah jenjang pendidikan menengah, yang berupa program pendidikan diplomat, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. pendidikan tinggi/ perguruan tinggi dapat ” berupa akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut serta universitas.

2.1.4 Pengangguran

2.1.4.1 Pengertian Pengangguran

Tiap negara dapat memberikan defenisi yang berbeda mengenai defenisi pengangguran. Defenisi pengangguran menurut Nanga adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. pengangguran juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tergolong dalam angkatan kerja, ingin mendapatkan pekerjaan, atau belum dapat memperolehnya (Puspa et al., 2022).

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang paling krusial dalam suatu perekonomian baik negara maju maupun negara berkembang, yang sangat penting dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan. Peningkatan jumlah pengangguran disebabkan oleh menurunnya persentase pertumbuhan ekonomi. Penurunan persentase pertumbuhan ekonomi akan berdampak terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja (Hasanah et al., 2021).

Apabila tenaga kerja tidak diserap dengan optimal, maka akan menimbulkan permasalahan pengangguran. Pengangguran juga merupakan masalah makro ekonomi yang dapat mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Biasanya orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan rekanan psikologis. Sehingga tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politis sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Wijaya et al., 2020).

Dalam Islam juga mengajarkan bahwa pembangunan adalah tugas semua orang dan tidak dapat dibebankan kepada sekelompok orang saja. Karena Islam mencela orang-orang yang menganggur dan tidak melakukan kegiatan produktif untuk memperbaiki kehidupannya maupun kehidupan masyarakat secara luas.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (way of life), di mana Islam telah menyediakan

berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang di kalangan ilmuwan, meskipun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini adalah sebuah keniscayaan (Yuliadi, 2016).

Untuk mengetahui besar kecilnya Tingkat Pengangguran dapat diamati dengan dua pendekatan antara lain sebagai berikut (Amarodin, 2014):

1) Pendekatan Angkatan Kerja (Labor Force Approach)

Besar kecilnya Tingkat Pengangguran dihitung berdasarkan persentase dari perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.

2) Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (Labor utilization approach)

Untuk menentukan besar kecilnya Tingkat Pengangguran yang didasarkan pada pendekatan pemanfaatan tenaga kerja antara lain:

- a. Bekerja Penuh (employed) yaitu orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam perminggu
- b. Setengah menganggur (underemployed) yaitu mereka yang bekerja, tetapi belum dimanfaatkan secara penuh, artinya jam kerja mereka dalam seminggu kurang dari 35 jam perminggu,

2.1.4.2 Jenis- Jenis Pengangguran

Menurut Sri Endang, dkk, didalam buku pengantar ekonomi makro, pengangguran dapat dbedakan kedalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut (Ridwan et al., 2017):

a. Pengangguran Friksional (frictional unemployment)

Pengangguran friksional merupakan bagian pengangguran yang disebabkan oleh kerja normalnya pasar tenaga kerja. Pengangguran friksional juga sering disebut pengangguran sukarela karena tidak adanya kesesuaian antara lapangan kerja dan tenaga kerja. Istilah itu merujuk pada pencocokan pekerjaan atau keterampilan jangka pendek. Selain itu pengangguran friksional juga merupakan pengangguran yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan didalam syarat-syarat kerja, yang terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi. Jenis pengangguran ini juga terjadi akibat berpindahnya orang-orang dari satu daerah kedaerah lain, atau dari satu pekerjaan kepekerjaan lain, dan akibatnya harus mempunyai tenggang waktu dan bersetatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain.

b. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman disebabkan oleh perubahan-perubahan musiman atas permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam satu tahun. Pengangguran ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi disektor pertanian. Yang dimaksud dengan pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam satu tahun. Biasanya pengangguran seperti ini berlaku pada waktu dimana kegiatan bercocok tanam

sedang menurun kesibukannya. Dengan demikian, jenis pengangguran ini terjadi untuk sementara waktu saja.

c. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Atau dengan kata lain pengangguran ini diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan memproduksinya. Dalam pelaksanaannya berarti jam kerja dikurangi, sebagian mesin produksi tidak digunakan, dan sebagian tenaga kerja diberhentikan. Dengan demikian, kemunduran ekonomi akan menaikkan jumlah dan Tingkat Pengangguran .

d. Pengangguran Struktural

Pengangguran structural muncul karena perubahan selera, teknologi, pajak, dan akibat perubahan penggunaan teknologi atau perubahan kebijakan pemerintah. Dikatakan pengangguran structural karena sifatnya yang mendasar. Pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerja yang tersedia. Hal ini terjadi didalam perekonomian yang berkembang pesat. Makin tinggi dan rumitnya proses produksi atau teknologi produksi yang digunakan, menuntut persyaratan tenaga kerja yang juga makin tinggi. Dilihat dari sifatnya pengangguran structural lebih sulit diatasi dibandingkan pengangguran friksional. Selain membutuhkan pendanaan yang besar, juga waktu yang lama. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan

pengangguran structural yaitu sebagai akibat dari kemerosotan permintaan atau sebagai akibat dari semakin canggihnya teknik memproduksi. Faktor yang kedua memungkinkan suatu perusahaan menaikkan produksi dan pada waktu yang sama mengurangi pekerja.

2.1.4.3 Bentuk- Bentuk Pengangguran

Menurut Sukirno (Ridwan et al., 2017), terdapat beberapa kelompok pengangguran yang dilihat dari jam kerja yaitu :

- 1) Pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
- 2) Setengah menganggur (*under unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu
- 3) Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

2.1.4.4 Akibat-akibat buruk pengangguran

Pengangguran selain berdampak pada segi ekonomi juga pada segi sosial. Dari segi ekonomi, pengangguran menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, turunnya kemampuan menabung masyarakat sehingga tingkat investasi menurun. Sedangkan dari segi sosial pengangguran dapat menyebabkan tingginya angka kriminalitas, bertambahnya penduduk miskin, bertambahnya anak putus sekolah,

meningkatnya pengemis, anak jalanan dan tunawisma. Pengangguran dapat disebabkan dua pokok masalah, yaitu banyaknya tenaga kerja yang tersedia atau terbatasnya lapangan kerja (Fidela, *et al*, 2021). Beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek dimana dua aspek tersebut yaitu (Ridwan et al., 2017):

a. Akibat buruk ke atas kegiatan perekonomian

Tingkat Pengangguran yang relative tinggi tidak memungkinkan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari memperlihatkan berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimumkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapai. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan-pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
- 2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Jika penerimaan pajak rendah, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.

- 3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sector swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasiti mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan keuntungan kelesuan berkurang. Kegiatan keuntungan perusahaan yang rendah menyebabkan mengurangi keinginan untuk melakukan investasi.
- 4) Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat, Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah:
 - a) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan.
 - b) Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktik.
 - c) Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini penulis akan melampirkan beberapa penelitian dengan dibawah ini.

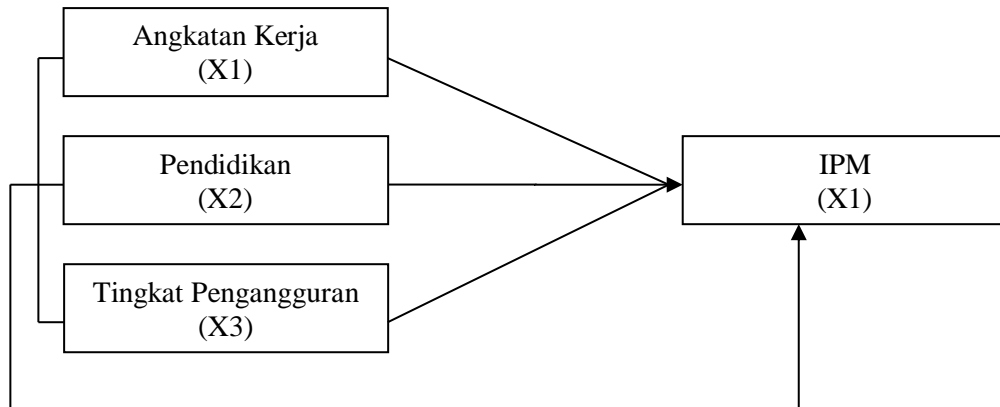
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Nurul Farida (2023)	Pengaruh pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Secara simultan pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka bersama-sama mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia
2	Nashih, et, al (2024)	Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dalam Memediasi Pengaruh Tingkat pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Pulau	Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengaruh Tingkat pendidikan , Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai dampak yang signifikan dan positif terhadap Tingkat Pengangguran , sedangkan pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap Tingkat Pengangguran . Selain itu, penelitian ini menunjukkan

		Kalimantan		bahwa variabel IPM dapat berfungsi sebagai mediator antara variabel Tingkat Pengangguran dan pertumbuhan ekonomi
3	Siahaan, et al (2022)	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara	Indeks Pembangunan Manusia; pendidikan ; Tingkat Pengangguran Terbuka; dan Regresi Linier Berganda.	Metode ini mengungkapkan, ditemukan hubungan yang negatif indeks pembangunan manusia dan tingkat pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran yang berarti bahwa ketika kedua variabel yang dibahas naik, justru Tingkat Pengangguran terbuka akan berkurang. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan indeks pembangunan manusia dan tingkat pendidikan Sumatera Utara dalam rangka menurunkan Tingkat Pengangguran terbuka secara regional.
4	Mahesa, et al (2024)	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2011-2020	Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Pengangguran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama IPM dan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2011-2020

5	Sitompul, et al (2023)	Pengaruh kemiskinan, pendidikan , dan pengangguran Terhadap indeks pembangunan manusia	Kemiskinan, pendidikan , Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia	<p><i>The results of the t test show that poverty partially influences the human development index in North Sumatra Province. Education has no partial effect on the human development index in North Sumatra Province. Unemployment has no partial effect on the human development index in North Sumatra Province. Meanwhile, the results of the f test show that poverty, education and unemployment influence the human development index simultaneously</i></p>
---	------------------------	--	---	--

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar II.2 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam suatu penelitian, yang belum diketahui hasil akhirnya, adapun hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah :

- a. H1 : Terdapat pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia
- b. H2 : Terdapat Pengaruh pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia
- c. H3 : Terdapat Pengaruh Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia
- d. H4 : Terdapat pengaruh Angkatan Kerja, pendidikan dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia